

Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah

(Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)

Muhammad Firyal Akbar*

Abstrak

Berbagai kendala dalam program pemberian dana BOS di Kabupaten Mamuju Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan dari program pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara, dengan melihat atau mengukur evaluasinya menggunakan Kriteria evaluasi seperti efektifitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan Metode atau pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, adapun yang menjadi kasus dalam penelitian ini yaitu kasus yang menjadi rumusan masalah peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) langsung dilapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara Purposive, dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil evaluasi program pemberian dana bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa program ini sudah dijalankan dengan cukup baik dan dapat dilanjutkan, namun begitu masih ada catatan yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam program ini sehingga diperlukan kajian ulang untuk keberhasilan dan kemaksimalan dari tujuan program dana BOS itu sendiri.

Kata Kunci : *Evaluasi Kebijakan, Program Pendidikan, Biaya Operasional Sekolah (BOS)*

Abstract

Various problems in the school operational funds program in North Mamuju regency. This study aims to evaluate of the implementation of a program of school operational funds (known as BOS) at the elementary Schools in North Mamuju. The variables of this study are effectiveness, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. This study use qualitative method or approach to the design of case study research, as for that being the cases in this study is the case that the formulation of the research problem. Data was collected by observation in the field, in-depth interviews, and documentation. The determination of conducted purposive informant, the informant saw the fit between a candidate with the required information. Data were analyzed with data reduction, data display, and draw conclusions. This study was shows that the evaluation of the results of operational assistance grant program at the school in elementary school Mamuju shows that this program is executed quite well and can continue, but there is still a record to be flaws and weaknesses in the program so it is necessary to review it maximize of success and goals of the program itself BOS.

Keywords: Policy Evaluation, Education Program, School Operational Fund

*Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
firyalakbar@yahoo.co.id

I. Pendahuluan

Dasar dari kemajuan suatu bangsa ialah bagaimana tingkat pendidikan dari bangsa itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan oleh UNDP tentang HDI (*Human Development Index*) atau Index Pembangunan Manusia. IPM memiliki tiga hal dalam mengukur tingkat kemajuan ataupun pembangunan suatu bangsa yakni tingkat pendidikan, kesehatan dan varitas daya beli (ekonomi). Peran pendidikan pun kemudian menjadi sangat penting dalam upaya mempersiapkan dan kemudian menghasilkan sumber daya manusia (*Human Resources*) yang baik. Dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, berbagai program pendidikan telah diluncurkan oleh pemerintah sendiri seperti program wajib belajar 9 tahun, kebijakan pendidikan gratis, pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan masih banyak program-program dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu dari berbagai program yang telah diluncurkan oleh pemerintah tersebut yang masih berlangsung hingga saat ini ialah pemberian dana bantuan operasional sekolah atau pemberian dana BOS.

Definisi dari dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa teleko-

munikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Dalam buku petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah dijelaskan bahwa secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus, program BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan dana BOS di beberapa wilayah mengalami beberapa permasalahan, misalnya dalam hal pencapaian tujuan dari dana BOS itu sendiri. Berbagai hal menjadi alasannya diantaranya bahwa dana BOS yang dikucurkan kemudian belum maksimal dengan jumlah sekolah yang ada, pencairan dana BOS yang masih mengalami keterlambatan, dan adanya indikasi penyelewengan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana BOS. Hal tersebut kemudian menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat program ini sudah berjalan hampir 8 tahun lamanya, sehingga perlu diadakan evaluasi terhadap program ini. Begitupun kemudian yang terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat, dimana persoalan-persoalan yang menyangkut disorientasi penggunaan dana BOS,

bahkan dari hasil pengamatan langsung, dan hasil perbincangan lepas dengan para pelaksana dana BOS seperti para Kepala Sekolah maupun guru-guru, didapatkan informasi bahwa pemberian dana BOS untuk Kabupaten Mamuju Utara belum efektif. Berbagai hal menjadi alasannya diantaranya bahwa dana BOS yang dikucurkan kemudian belum maksimal dengan jumlah sekolah yang ada, pencairan dana BOS yang masih mengalami keterlambatan, dan adanya indikasi penyelewengan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana BOS.

Kelemahan lain pelaksanaan program BOS adalah secara konseptual BOS diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, tetapi kenyataan di lapangan belum sepenuhnya siswa/siswi miskin tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep program bantuan BOS sehingga perlu diluruskan. Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini kurang melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid /wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekuarangan anggaran sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah.

Kenyataan lain yang menjadi cerminan dalam kurang maksimalnya pelaksanaan BOS di kabupaten Mamuju Utara dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia bidang pendidikan di Kabupaten Mamuju Utara. Indeks pendidikan merupa-

kan komponen IPM yang penting. Meskipun secara umum pembangunan pendidikan di Kabupaten Mamuju Utara relatif membaik, di mana ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase penduduk yang melek huruf. Jumlah penduduk yang mampu membaca dan menulis di Kabupaten Mamuju Utara tergolong tinggi. Hal ini terlihat pada periode tahun 2006-2011, angka melek huruf Kabupaten Mamuju Utara cenderung mengalami kenaikan walaupun bergerak lambat. Pada tahun 2011, angka melek huruf penduduk Kabupaten Mamuju Utara telah mencapai 95,59 persen. Dengan demikian masih terdapat 4,41 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat, namun, untuk indikator angka partisipasi sekolah (APS) tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menjadi penting karena APS sendiri menjadi indikator penting untuk menilai bagaimana tingkat partisipasi anak-anak di Kabupaten Mamuju Utara untuk menempuh pendidikan atau bersekolah, yang jika dikaitkan dengan adanya program dana BOS yang bertujuan untuk menggratiskan biaya operasional sekolah terutama bagi masyarakat miskin untuk siswa/siswi tingkat SD, MI, serta tingkat SLTP dan MTS baik negeri maupun swasta, tentu akan membantu masyarakat untuk kemudian mendorong anak-anaknya untuk bersekolah.

Apa yang telah dijelaskan sebelumnya menggambarkan bahwa kebijakan program dana BOS pada prakteknya masih jauh dari harapan kita pada khususnya dan

pemerintah sendiri pada umumnya. Dalam hal ini dilihat dari sudut pandang ilmu kebijakan publik bahwa ada ketidaksesuaian antara tujuan atau poin-poin program dengan hasil yang dicapai di lapangan. Olehnya itu, sangatlah perlu diadakan penelitian mengenai Evaluasi kebijakan tentang program pemberian dana BOS tersebut untuk melihat sejauh mana program ini berjalan dengan baik atau tidak, dan apakah telah mencapai tujuannya, serta apakah kebijakan tersebut memberi dampak yang baik bagi masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Lester dan Stewart (Budi Winarno 2012), bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan dalam dua tugas berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekwensi-konsekwensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua ialah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Wirawan (2012:7) menjelaskan Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Dalam evaluasi juga dikenal tentang evaluasi program, Ralph Tyler, 1950 (dalam Farida, 2008) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach dan Stufflebeam dalam Karding (2008) menjelaskan evaluasi program ada-

lah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Beni Setiawan dalam Karding,(2008) menjelaskan bahwa tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Evaluasi sendiri bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan,2012). Lebih lanjut bahwa dalam evaluasi dikenal adanya evaluasi program yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi (Yusuf,2008). Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Adapun indikator-indikator yang biasa digunakan dalam evaluasi ialah : Efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan (Dunn, 2003).

Dengan alasan yang telah ada mengenai pentingnya evaluasi dalam program pemberian dana BOS ini, maka suatu langkah yang baik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai masalah tersebut dengan

melakukan evaluasi mengenai program dana BOS ini pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara dengan memfokuskan atau mengukur evaluasi dengan menggunakan kriteria efektifitas, kecukupan, pertepatan, resvonsipitas dan ketepatan, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan dari program pemberian dana (BOS) di Kabupaten Mamuju Utara.

II. Kajian Literatur

Definisi dan Konsep Evaluasi

Menurut Lester dan Stewart (Leo Agustino, 2008:185) menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Anderson (dalam Arikunto Suharsimi dan Cepi Safrudin, 2004) memandang Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam (dalam Arikunto Suharsimi dan Cepi Safrudin, 2004), mengungkapkan bahwa Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Wirawan (2012:7) menjelaskan “Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan memband-

ingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi”.

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn (1999:608), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Lebih lanjut Dunn (Subarsono, 2011: 124) menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni evaluasi semu; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menayakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Selanjutnya evaluasi formal; yakni adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya evaluasi proses keputusan teroitis; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

Sebagai pembanding James P. Lester dan Joseph Steward Jr. (Nugroho, 2009:674) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi dampak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/

atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan evaluasi metaevaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu. Sedangkan James Anderson (Winarno, 2012:168), membagi evaluasi kebijakan publik menjadi tiga, tipe pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. Kedua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Secara umum Dunn (Nugroho, 2009:671) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni :

- *Efektifitas* ; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
- *Efisiensi* ; seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- *Kecukupan* ; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
- *Perataan* ; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
- *Responsivitas* ; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
- *Ketepatan* ; apakah hasil (tujuan) yang

diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Konsep Evaluasi Program

Karding (2008) menjelaskan bahwa program dapat diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu :

- a) Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
- b) Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Ralp Tyler, 1950 (Farida 2008:7) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach dan Stufflebeam menjelaskan evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan

kepada pengambil keputusan.

Suharsmi Arikunto dan Cepi Safrudin (2004 : 14) mengatakan bahwa “Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.”

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Konsep Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam buku petunjuk teknis tentang dana BOS tahun 2012 , BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai

dengan dana BOS.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- 1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SM-PLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
- 2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun
2. SMP/SMPLB/SMPT : Rp 710.000,-/siswa/tahun

Kajian Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian mengenai evaluasi program dana BOS di Indonesia menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dalam arti masih memiliki kekurangan-kekurangan, seperti hasil penelitian mengenai evaluasi dana BOS pada Sekolah tingkat menengah pertama (SMP) di Kota Semarang, yang menyimpulkan bahwa ternyata potensi dana BOS belum mampu untuk menjangkau seluruh siswa miskin /tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan secara memadai (Karding,2008). Hasil penelitian lainnya mengenai Analisis Pemantauan Outcome Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Madrasah Tsanawiyah Gresik, menunjukkan menunjukkan bahwa secara umum outcome BOS sudah baik, akan tetapi untuk partisipasi masyarakat ada kecenderungan makin menurun. Ini terjadi karena para pembuat kebijakan di hadapkan pada persoalan untuk menuntaskan wajib belajar tetapi disisi lain tuntutan mutu pendidikan harus ditingkatkan dan ini membutuhkan biaya yang cukup besar (Haqim,2007). Dari pemaparan tersebut kemudian menunjukkan bahwa pada dasarnya masih ada ketidakmaksimalan dalam hal pelaksanaan program, sehingga evaluasi mengenai program dana BOS perlu untuk dilakukan secara berkelanjutan.

III. Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan

deskriptif. karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, dengan harapan dapat diketahui mengenai evaluasi program pemberian dana BOS di Kabupaten Mamuju Utara.

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini ialah menggunakan studi kasus. Adapun studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pada sekolah-sekolah untuk tingkat SD atau sederajat, yang berada pada wilayah Kabupaten Mamuju Utara yang mendapatkan dana BOS.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan ialah berada di lingkup wilayah Kabupaten Mamuju utara, dengan beberapa objek lokasi yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya ialah beberapa Sekolah dalam hal ini SD dan sederajatnya yang berada dalam wilayah Kabupaten mamuju Utara. Adapun sekolah-sekolah yang dimaksud ialah Sekolah dasar SDN 001 Pasangkayu, SDN Salunggadue, MI DDI Pasangkayu yang berada di wilayah Kecamatan Pasangkayu, selanjutnya SDN Balabonda di Kecamatan Sarjo, selanjutnya SDN Bambalamotu di Kecamatan Bambalamotu, SD Inpres Malei yang ada di Kecamatan Pedongga, dan SDN 10 Pajalele di Kecamatan Tikke Raya.

Sumber Data

Secara umum sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu :

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan sumber-sumber tidak tertulis atau data lapangan melalui wawancara mendalam (indepth interview) kepada para informan, melalui teknik sengaja sesuai tujuan penelitian (purposive) dan triangulasi kepada stakeholder dalam program pemberian dana BOS serta pihak-pihak yang mengetahui konteks penelitian.
- 2) Data sekunder, yaitu diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Strategi ini dilakukan untuk dapat membangun sebuah abstraksi tentang tujuan penelitian yang didukung oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan, sehingga sifat penyusunannya adalah dari kesimpulan umum ke khusus.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi Wawancara, Observasi (pengamatan) dan olah data dokumen. Adapun Informan yang diwawancarai dalam penelitian ditentukan secara *purposive*, dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Artinya, informan yang akan dipilih adalah mereka yang betul-betul memiliki kompetensi tentang pelaksanaan pemberian dana BOS. Informan dalam studi ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara, Manajer BOS Kabupaten Mamuju Utara, Unit Pengawas

dana BOS, para kepala sekolah, bendahara BOS sekolah, ketua komite sekolah dan beberapa orang tua siswa/siswi.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Kabupaten Mamuju Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2003, yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten mamuju. Pada mulanya kabupaten Mamuju utara hanya memiliki 4 kecamatan yakni kecamatan Bambalamotu, Pasangkayu, Baras dan Sarudu, dan 33 desa dengan luas wilayah 304.375 ha. Kini setelah perkembangannya kabupaten Mamuju Utara terdiri dari 12 kecamatan dan 63 desa berdasarkan perda nomor 8 tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan dan perda nomor 7 tahun 2007 tentang pembentukan desa. Kegiatan pemerintahan dan perekonomian daerah dipusatkan di kota pasangkayu dan di seluruh wilayah kecamatan secara bertahap dilakukan pada pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana. Untuk mengetahui secara terperinci tentang kabupaten Mamuju utara berikut akan diuraikan secara terperinci.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai evaluasi program pemberian dana BOS pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Utara, baik itu pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan pengolahan data dokumen, dimana penelitian ini akan dijelaskan dengan melihat kriteria-kriteria evaluasi yang digunakan dalam mengukur proses evaluasi, antara lain :

Kriteria Efektifitas

Efektifitas atau (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dalam evaluasi yang dilakukan efektifitas digunakan untuk melihat sejauh mana realisasi dari tujuan dari program pemberian dana BOS itu sendiri yang ada pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Utara. Adapun indikator yang digunakan dalam melihat efektifitas program pemberian dana BOS pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Utara ialah, sejauh mana pencapaian tujuan dari program BOS yakni pembebasan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri, selanjutnya realisasi perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), selanjutnya usaha dalam sosialisasi program dana BOS, dan yang terakhir pengawasan dalam program dana BOS itu sendiri

Dari empat indikator yang digunakan dapat dijelaskan bahwa pencapaian tujuan dari dana BOS yakni pembebasan pungutan bagi siswa-siswi SD/MI/SDLB sudah tercapai, dimana hingga saat ini sejak adanya dana BOS para siswa sudah tidak dipungut biaya lagi dalam operasional sekolah sebagaimana yang diatur dalam Juknis BOS.

Hasil wawancara di Sekolah SDN 001 Pasangkayu, yakni ibu Kepala Sekolah yang berinisial H, mengungkapkan bahwa :

“.....saat ini dengan adanya dana BOS sekolah tidak memungut pembayaran apapun dari siswa, karena di dalam petunjuk teknis

BOS sudah diatur tentang itu, BOS digunakan untuk membiayai kebutuhan belajar siswa dan kebutuhan mengajar para guru, jadi anak-anak yang bersekolah sudah tidak dikenakan pungutan. (hasil wawancara: Senin 1 Juli 2013)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Sekolah SDN Balabonda Kecamatan Sarjo yang berinisial AR yang menjelaskan :

“.....Alhamdulillah sudah tidak ada pungutan, karena dengan adanya dana BOS sangat membantu dalam hal operasional Sekolah, dan membantu orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dan kami takut melakukan itu karena sudah ada aturannya. (hasil wawancara: Rabu, 26 Juni 2013)

Selanjutnya, indikator kedua yakni proses perencanaan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), sudah terealisasi dengan baik, dimana proses penyusunan RKAS disusun bersama antara para pihak sekolah dengan para orang tua serta pihak yang terkait dalam menyusun program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekolah untuk tahun ajaran selanjutnya, sehingga tercipta sinergitas yang cukup baik dalam operasional di beberapa sekolah.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Bambalamotu berinisial S, yang menjelaskan bahwa :

“.....pihak sekolah dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah, bendahara BOS dan dewan guru bersama dengan orangtua yang diwakili komite duduk bersama membahas RAPBS itu, sehingga antara pihak seko-

lah dan orangtua saling membantu dalam proses penyusunannya, dimana kami juga selalu mendengar aspirasi-aspirasi orangtua, dan RAPBS itu tidak akan sah jika tidak diketahui oleh komite dimana ketua komite juga bertanda tangan dalam hasil rapat penyusunan itu. (hasil wawancara: Jumat 28 Juni 2013).

Hasil wawancara yang lain dengan Ketua Komite SDN 001 Pasangkayu berinisial JA, menjelaskan bahwa :

“.....kami bersama pihak sekolah bersama dalam penyusunan RAPBS itu, dimana pihak orangtua selalu diundang oleh sekolah dalam rangka kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan sekolah, sehingga biasanya kepala sekolah juga meminta pendapat kami sebagai yang mewakili orang tua tentang hal-hal apa saja yang sebaiknya dilaksanakan di sekolah. (hasil wawancara: 22 juli 2013).

Selanjutnya untuk indikator ketiga usaha sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program BOS juga sudah terealisasi, sebagaimana hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa ada usaha sosialisasi yang dilakukan baik itu dalam bentuk rapat, pertemuan dan di beberapa sekolah sudah terpasang spanduk yang mengajak para masyarakat untuk menyekolahkan anaknya karena sekolah sudah tidak dipungut biaya lagi. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 10 Pajalele Kecamatan Tikke Raya berinisial H, mengemukakan bahwa :

“...kami telah memasang spanduk sekolah

gratis, yang menjelaskan bahwa sekolah kami menyelenggarakan BOS sebagaimana kewajiban yang ada dalam Juknis, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa di sekolah ini sudah tidak dipungut biaya lagi jika ingin bersekolah, selain itu kami juga sering mendatangi para orang tua jika kami mengetahui ada anaknya yang sudah cukup umur untuk bersekolah namun belum bersekolah, dan kemudian kami memberikan pengertian dan mengajak anaknya untuk bersekolah. (hasil wawancara: Kamis 27 Juni 2013).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala MIS DDI Pasangkayu, berinisial JR, yang mengungkapkan bahwa:

“.....kami sering mengajak para orang tua jika sudah memasuki tahun ajaran baru untuk mengajak anaknya bersekolah di sekolah kami, baik itu kami umumkan di masjid, maupun pertemuan majelis ta'lim jika saya lagi membawakan ceramah, selanjutnya diacara rapat bersama komite, yang mana mengajak mereka untuk menyekolahkan anaknya di sekolah karena sekolah saat ini sudah tidak dipungut biaya. (hasil wawancara: Selasa, 2 Juli 2013).

Indikator terakhir untuk pengawasan terhadap program dana BOS menunjukkan hasil yang kurang maksimal atau dengan kata lain pelaksanaannya belum tercapai maksimal, karena terkendala masalah dana dan personil yang tidak ada. Hasil wawancara dengan Bendahara dana BOS MI DDI Pasangkayu menjelaskan bahwa :

“.....sepanjang pengetahuan saya, selama saya menjadi bendahara dana BOS di sekolah ini kalau dari Dinas Pendidikan

Kabupaten belum pernah ada yang datang mengawasi tentang program BOS, yang ada hanya pengawasan dari Depag karena kami juga berada di naungannya. (hasil wawancara : Selasa 2 Juli 2013).

Hasil wawancara yang lain dengan Kepala Sekolah SDN Salungadue, berinisial SB, menjelaskan bahwa :

“.....sejauh ini pengawasan menyangkut pelaksanaan dana BOS ke sekolah kami belum ada, walaupun ada pegawai dari Dinas Pendidikan yang datang hanya ada keperluan lain, bukan melakukan pengawasan terhadap dana BOS (hasil wawancara : Selasa 25 Juni 2013)

Kriteria Kecukupan

Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria pada kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Adapun indikator yang dijadikan peneliti dalam mengukur atau melihat tingkat kecukupan dalam program pemberian dana BOS di Kabupaten Mamuju Utara ialah dengan melihat ketersediaan dana atau alokasi dana yang ada terhadap jumlah siswa yang ada di sekolah, dan program-program kegiatan yang telah direncanakan sekolah.

Untuk kriteria kecukupan dari indikator yang digunakan yakni ketersediaan alokasi dana terhadap kebutuhan operasional. Hasil wawancara disimpulkan bahwa dana yang tersedia untuk sekolah-sekolah

yang jumlah muridnya tidak terlalu banyak masih perlu mendapat perhatian lebih. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Balabonda, Kecamatan Sarjo, berinisial AR, menjelaskan bahwa :

“.....jika dihitung-hitung, memang dana yang kami punyai cukup besar, dimana kami mendapatkan dana BOS 300 jutaan, namun dengan banyaknya program atau kegiatan sekolah seperti kegiatan lomba, kegiatan ekstrakurikuler, penyediaan ATK dan honorarium guru, dana tersebut hampir setiap tahunnya terpakai dan habis, tetapi dana yang sudah ada menurut saya sudah mencukupi.(hasil wawancara : Rabu 26 Juni 2013).

Hendaknya ada penambahan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasional sekolah sebagaimana yang diatur dalam Juknis BOS itu sendiri, karena selain kebutuhan-kebutuhan di tiap sekolah yang berbeda besaran dana BOS untuk membiayai komponen tersebut juga berbeda.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Inpres Malei, menjelaskan bahwa :

“.....dana kami yang terima setiap triwulannya hanya sekitar 15 juta, sehingga untuk tahun ini kami menerima dana BOS sekitar 60 jutaan, kalau ditanya apakah dana itu cukup, ya dicukup-cukupkan, karena kebutuhan operasional sekolah yang harus dipenuhi cukup banyak, seperti pengadaan ATK, dan pembiayaan guru honor, tetap saya sudah memberhentikan dua dari lima guru honor yang ada karena sudah tidak mampu sekolah biayai, olehnya itu kami

berharap hendaknya ada penambahan terhadap jumlah dana BOS ini. (hasil wawancara : Kamis 27 Juni 2013)

Kriteria Perataan

Kriteria perataan (*equity*) biasa juga disebut dengan kesamaan. Kriteria perataan memfokuskan kepada distribusi dari suatu jenis program yang diterapkan, memberikan penggambaran misalnya apakah biaya atau anggaran yang ada dapat didistribusikan secara merata kepada target grup dalam hal ini publik dengan kategori-kategori kelompok yang berbeda. Untuk kriteria perataan, dari dua indikator yang digunakan yakni tingkat kesamaan para siswa dalam proses belajar mengajar serta kegiatan-kegiatan sekolah dan tingkat kesempatan siswa-siswi tidak mampu dalam mendapatkan bantuan pendidikan, dijelaskan bahwa untuk indikator pertama dari hasil wawancara dan penelusuran data didapatkan bahwa untuk masalah mengenai kesamaan dan kesempatan para siswa dalam memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah mereka sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena dari beberapa sekolah yang ada menjelaskan bahwa mereka tidak membedakan para siswa dalam memperoleh akses pendidikan yang ada di sekolah mereka sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesamaan dan kesempatan yang diberikan sekolah kepada siswa sebagai manifestasi dari pendistribusian alokasi anggaran program dana bantuan operasional sekolah sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 001 Pasangkayu berinisial H,

menjelaskan bahwa :

“.....kami tidak pernah membeda-bedakan siswa yang ada di sekolah, biar dia anak orang mampu, anak orang miskin, anak pejabat, semuanya sama, jadi kesempatan untuk memperoleh fasilitas di sekolah juga sama, termasuk jika ada dari mereka yang ingin mengikuti lomba, sekolah memberikan kesempatan kepada mereka semua, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Mereka juga diberikan kesempatan yang sama untuk masuk di perpustakaan, di laboratorium tanpa ada pengecualian, tetapi tetap dibimbing oleh Bapak Ibu gurunya. (hasil wawancara : senin 1 Juli 2013).

Selanjutnya untuk indikator tingkat kesempatan siswa tidak mampu atau miskin dalam mendapatkan bantuan pendidikan sebagaimana hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa sudah ada pemberian bantuan dana untuk mereka yang tidak mampu, namun masih ada beberapa sekolah yang belum memberikan bantuan tersebut secara merata untuk setiap tahunnya, disebabkan jumlah dana yang terbatas, tetapi secara keseluruhan bahwa kesempatan para siswa tidak mampu atau miskin dalam mendapatkan bantuan pendidikan sudah terealisasi. Beberapa hasil wawancara tersebut seperti hasil wawancara dengan Kepala sekolah SDN 10 Pajalele Kecamatan Tikke Raya, menjelaskan :

“.....kami setiap tahunnya memberikan bantuan siswa miskin kepada siswa yang sudah kami data sebelumnya, baik itu berupa bantuan dana maupun bantuan seragam dan alat tulis menulis, tetapi karena meng-

ingat jumlah siswa miskin di sekolah kami cukup banyak maka kami membagi dana bantuan siswa miskin itu secara merata sehingga semuanya dapat, jadi kami biasanya membelikan mereka baju seragam dan alat tulis menulis mereka saja, untuk penyediaan alat transportasi belum ada karena dana yang terbatas. (hasil wawancara Kamis 27 Juni 2013)

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Inpres Malei menjelaskan bahwa :

“.....kami juga pernah memberikan bantuan siswa miskin itu berupa bantuan baju sekolah, dan pembelian buku dan alat tulisnya, namun karena keterbatasan dana yang ada dengan jumlah siswa miskin yang banyak maka kami tidak bisa membelikan mereka semua, jadi biasanya kami berikan bertahap, misalnya tahun ini yang sudah dapat nanti tidak dapat lagi ditahun berikutnya. (hasil wawancara: Kamis 27 Juni 2013)

Kriteria Responsivitas

Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa suatu kebijakan/program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat. Kriteria reponsivitas kemudian menjadi penting karena dari penilaian kriteria ini akan dapat memuaskan kriteria-kriteria sebelumnya yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan dan pemerataan, karena jika kriteria ini yang gagal maka alternatif dari suatu kebijakan dapat dipastikan gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari dua indikator yang ada yang

digunakan peneliti untuk melihat kriteria responsivitas yakni tingkat kepuasan masyarakat dan dampak yang ditimbulkan dalam program dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Mamuju Utara, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat Mamuju Utara di lokasi penelitian yang didatangi di beberapa kecamatan menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat sudah cukup puas dengan adanya program ini dengan asumsi dari sebagian menganggap bahwa program ini sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi kelas menengah ke bawah dimana mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Hasil wawancara dengan Ketua Komite SDN 001 Pasangkayu yang berinisial JA, menjelaskan bahwa :

“.....secara keseluruhan program BOS sangat membantu para orang tua, karena orang tua sudah tidak harus memikirkan biaya yang harus mereka keluarkan dalam menyekolahkan anaknya, jadi saya rasa program ini sangat membantu, dan orang tua cukup puas dengan adanya program ini. (hasil wawancara: 22 Juli 2013)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komite SDN 10 Pajalele yang berinisial BA, yang mengungkapkan bahwa :

“.....dengan adanya program BOS para orang tua sudah merasa puas dan senang karena sudah dapat menyekolahkan anaknya, dimana kalau dulu orang tua yang banyak anaknya sangat susah menyekolahkan anaknya karena masalah biaya. (hasil

wawancara :Kamis 27 Juni 2013)

Begitupun yang diungkapkan oleh Ketua Komite SDN Bambalamotu yang berinisial SA yang mengemukakan :

“....saya yang mewakili orang tua menyatakan kepuasan dengan adanya program ini, dalam arti program ini sangat-sangat membantu bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menyekolahkan anaknya (hasil wawancara : Jumat 28 Juni 2013).

Sedangkan untuk dampak dari program BOS ini lebih banyak berdampak positif dimana dampaknya antara lain dapat meningkatkan kesadaran dan merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya pendidikan dan secara tidal langsung dapat meningkatkan derajat kesejahteraan dalam hal pendidikan.

Kriteria Ketepatan

Kriteria ketepatan (*appropriateness*), berbicara mengenai apakah hasil yang dicapai mendatangkan manfaat. Secara keseluruhan untuk kriteria ketepatan dari dua indikator yang digunakan yakni peningkatan angka partisipasi sekolah dan tingkat penurunan jumlah siswa-siswi putus sekolah dalam pelaksanaan program pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Mamuju Utara menunjukkan pencapaian hasil yang baik. Pada indikator pertama dalam peningkatan angka partisipasi sekolah dari hasil wawancara dan pengamatan pada beberapa sekolah menunjukkan bahwa program dana BOS telah dapat meningkatkan

APS dengan tingginya minat para orang tua dalam mendaftarkan pada sekolah-sekolah yang ada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Utara.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 001 Pasangkayu, berinisial H, mengemukakan bahwa :

“.....Alahamdulillah Angka Partisipasi Sekolah semakin tahun semakin meningkat, terbukti saking banyaknya siswa yang ingin masuk di sekolah kami, sekolah terkadang membatasi dan bahkan menolak jika kuota yang kami sediakan sudah mencukupi, hal itu dikarenakan bahwa jumlah siswa yang ada sudah tidak sebanding dengan jumlah ruangan kelas yang kami sediakan. (hasil wawancara: Senin, 1 Juli 2013)

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah DDI Pasangkayuberinisial JR, menjelaskan bahwa :

“.....semenjak diadakan dana BOS, Alahamdulillah tingkat partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anaknya di sekolah ini meningkat, dimana kalau dulu kami sangat kekurangan murid, itu dikarenakan karenabanyak orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya di sekolah agama, mereka lebih memilih sekolah negeri, tetapi beberapa tahun terakhir kami sudah memiliki murid yang cukup banyak, bahkan kami sudah menolak jika murid yang ada sudah terlalu banyak. (hasil wawancara: Selasa, 2 Juli 2013).

Selanjutnya indikator kedua yakni penurunan jumlah siswa yang putus sekolah dari hasil wawancara dan penelusuran

data yang ada menunjukkan bahwa hampir tidak ada lagi siswa-siswi di beberapa sekolah yang ada di Mamuju Utara yang putus sekolah disebabkan karena masalah biaya, semenjak dilucurkannya program dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Inpres Malei Kecamatan Pedongga menjelaskan bahwa :

“.....alhamdulillah kalau ditanya mengenai anak-anak yang putus sekolah khususnya di sekolah ini sudah sangat jarang terjadi selama adanya dana BOS, walaupun ada yang berhenti sekolah itu bukan karena biaya, tetapi alasan lain. (hasil wawancara: Kamis 27 Juni 2013)

Hal yang sama kemudian dijelaskan juga oleh Kepala Sekolah SDN 10 Pajalele Kecamatan Tikke Raya, mengemukakan bahwa :

“.....selama saya menjadi Kepala Sekolah di sini belum ada siswa yang putus sekolah dikarenakan masalah biaya, bahkan kami mencari anak-anak yang berada di lingkungan sekolah kami yang belum sekolah, untuk mengajak mereka masuk sekolah, karena sekolah sudah tidak membayar lagi, bahkan kalau memang mereka tidak ada seragam kami biasanya membelikan jika ada dana yang tersedia. (hasil wawancara, Kamis 27 Juni 2013).

Pembahasan

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi terhadap program pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kabupaten

Mamuju Utara menemukan bahwa ada kriteria-kriteria evaluasi yang sudah tercapai tetapi ada juga yang menunjukkan belum tercapai. Namun sebagian besar dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kriteria evaluasi dari setiap indikator sudah tercapai, hal ini menandakan bahwa evaluasi terhadap program pemberian dana bantuan operasional sekolah memperlihatkan hasil yang cukup baik setidaknya untuk saat ini. Walaupun begitu, masih banyak catatan penting yang harus diselesaikan demi keberlanjutan program dana BOS khususnya di Kabupaten Mamuju Utara, karena bukan tidak mungkin beberapa hal yang kemudian belum maksimal dalam jalannya program dana BOS tersebut justru akan menjadi masalah besar ke depannya.

Beberapa masalah penting yang menarik untuk dilihat dari hasil evaluasi mengenai program pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Utara ialah sekalipun tujuan utama dari program ini sebagaimana yang diatur dalam buku petunjuk teknis BOS yakni membebaskan pungutan bagi siswa siswi dalam hal operasional sekolah sudah tercapai, dimana ditandai sudah tidak ada lagi pungutan yang ditemukan atau yang didapatkan laporan dari sekolah maupun para orangtua siswa, namun masih ada masalah-masalah yang menjadi poin penting yang kemudian substantif untuk segera diselesaikan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Nasional sebagai penggagas dan penanggung jawab penuh penuh dari program dana BOS, salah

satunya menyangkut alokasi anggaran untuk tiap sekolah, dimana sebagian sekolah masih sangat membutuhkan anggaran lebih dalam operasional sekolah selama satu tahun periodenya, karena tidak semua sekolah mempunyai jumlah siswa yang sama banyaknya, implikasinya adalah kuantitas dari jumlah anggaran dana BOS yang diterima.

V. Penutup

Hasil evaluasi mengenai program dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Utara, secara keseluruhan menunjukkan bahwa program ini sudah berjalan cukup baik, walaupun demikian masih ada poin-poin yang menjadi kelemahan ataupun kekurangan dalam menunjang berjalannya program ini, namun hal itu semestinya masih dapat diatasi.

Olehnya itu Dengan melihat hasil evaluasi dengan menggunakan kriteria-kriteria evaluasi dalam program pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar yang ada di Kabupaten Mamuju Utara yang menunjukkan hasil yang cukup baik dalam pelaksanaannya

hingga saat ini, maka peneliti menyarankan kiranya pemerintah tetap melanjutkan program ini, tetapi perlu ada perbaikan, seperti perlunya peningkatan jumlah anggaran dana BOS persiswanya, Selanjutnya pemerintah disarankan merevisi aturan tentang dana 20% untuk belanja pegawai yang ada dalam item dana BOS, karena tidak semua sekolah memiliki guru yang berstatus pegawai negeri yang imbasnya sekolah mengambil beberapa guru bantu untuk memenuhi kebutuhan jumlah siswa, yang dananya harus diambil dari dana BOS, tetapi dengan adanya aturan itu maka berdampak pada kesejahteraan guru bantu. Selanjutnya pemerintah semestinya menyediakan dana yang lebih untuk sekolah yang memiliki jumlah siswa-siswi miskin agar dalam pembagian bantuan tersebut di beberapa sekolah dapat dilaksanakan secara menyeluruh kesemua siswa yang berhak dibantu. Terakhir menyangkut masalah pengawasan yang belum tercapai hendaknya Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara menganggarkan dana pendampingan untuk pengawasan sesuai dengan Juknis BOS dalam rangka mengawasi pelaksanaan dana BOS di Ka-

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Dunn, William, (2003). *Analisis Kebijakan Publik*, Jogjakarta : Gadjah Mada University.
- Haqim, Luqmanul. (2007) . *Analisis pemantauan outcome program Bantuan operasional*

sekolah (bos) Di madrasah tsanawiyah gresik. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang

Hutasuhut, Mustika Sastia. (2010). *Evaluasi pelaksanaan program bantuan operasional sekolah di sekolah dasar negeri no. 125549 kelurahan martoba kecamatan siantar utara pematangsiantar. Medan : USU*

Karding, Abd. Kadir. (2008). *Evaluasi pelaksanaan program Bantuan operasional sekolah (BOS) Sekolah menengah pertama negeri Di kota semarang. Semarang : Universitas Diponegoro*

Kementrian Pendidikan Nasional. (2010) . *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta : Kemendiknas*

Nugroho,Riant.(2009). *Public Policy. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.*

Peraturan Pemerintah, RI No 48 Tahun (2008). *Tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta : Pemerintah RI.*

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun (2010). *Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011. Jakarta : Kemendiknas*

Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.*

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Bandung : Alfabeta.*

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, (2004). *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan. Bumi Aksara: Jakarta*

Wibawa, Samodra, dkk, (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*

Winarno, Budi, (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik, Edisi/Cetakan Kedua. Jogjakarta: Media Pressindo,*

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik, teori,proses dan studi kasus. Jakarta : CAPS. PT. Buku Seru.*

Wirawan.(2012).*Evaluasi,Teori,Model,Standar,Aplikasi dan Profesi. Jakarta : Rawjawali Prses.*

Yusuf, Farida. (2008). *Evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian. Jakarta : PT. Rineka Cipta.*